

Kerangka Acuan
**Diskusi Publik “Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa,
Sudah Sejauh Mana?”**

Pendahuluan

Keterbukaan informasi dalam konteks pengadaan barang dan jasa publik telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari tahapan perencanaan pengadaan hingga implementasi pengadaan. Bahkan cukup banyak inovasi yang terjadi dalam upaya memperbaiki tatakelola pengadaan barang/jasa. Namun demikian, upaya perbaikan yang telah dilakukan dirasa belum cukup. Mengingat korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah masih menempati urutan tertinggi kasus korupsi di Indonesia.

Digitalisasi pengadaan dirasa belum cukup untuk mengurangi praktik korupsi pengadaan. Faktanya, masih terdapat kasus-kasus korupsi, sebut OTT KPK yang terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 2023 yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Bandung. Dalam dua kasus tersebut, praktik korupsi terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa, padahal pengadaan di kedua tempat tersebut sudah menggunakan pembelian elektronik (e-purchasing) di platform katalog elektronik (e-catalogue/e-katalog) yang sempat diklaim bebas dari korupsi.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai:

1. Perkembangan kebijakan dan implementasi keterbukaan informasi pengadaan di Indonesia maupun global
2. Peran kelompok masyarakat dalam mengawal pengadaan barang dan jasa

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilakukan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Mei 2024

Waktu : 10:00 - 12:00 WIB

Tempat : Bappenas, Ruang DH 1-2

Jl. Taman Suropati No.2, Menteng Kota Jakarta Pusat

Bentuk Kegiatan

Diskusi dilakukan dalam bentuk talk show. Moderator akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci bagi setiap narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang masing-masing.

Narasumber dan Moderator

Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam isu keterbukaan informasi dan pengadaan, yaitu:

1. Emin Adhy Muhaemin, S.Si., M.Si, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum, Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Syawaludin, M.H, Komisioner Komisi Informasi Pusat
3. Siti Juliantari Rachman, Wakil Koordinator, Indonesia Corruption Watch (ICW)
4. Imam, COST Indonesia
5. Izza Akbarani (Moderator), Transparency International Indonesia (TII)

Pertanyaan Kunci

CSO

1. Apa saja transformasi pengadaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil dalam mendorong keterbukaan informasi PBJ?
3. Apa yang sudah didorong oleh organisasi masyarakat sipil dalam rangka mendorong transparansi pengadaan? Mengapa masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pengadaan barang/jasa pemerintah?
4. Apa pentingnya menghubungkan data beneficial Ownership dengan data penyedia di sistem kerja penyedia (SIKAP)?

LKPP

1. Pada 2023, lahir Perpres mengenai digitalisasi pengadaan, apa perubahan besar yang ingin dicapai melalui Perpres ini? Apakah sudah mengakomodir semangat keterbukaan informasi pengadaan?
2. Sudah sampai mana penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik? Apa hal penting yang diatur dalam RUU tersebut yang belum di cover oleh Perpres PBJ?
3. LKPP dengan Kemenkumham sempat menekan MoU mengenai penggunaan data BO, sudah sampai mana progress dari integrasi data Beneficial Ownership di Kemenkumham dengan data Sistem Informasi Penyedia (SIKAP) di LKPP?

KIP

1. Apa saja yang telah dilakukan oleh KIP dalam memastikan implementasi Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, khususnya mengenai pengadaan barang/jasa?
2. Dalam Monev Keterbukaan Informasi, salah satu indikator yang dinilai adalah keterbukaan informasi pengadaan, apa saja secara detail turunan indikator ini dan bagaimana keterpenuhan Badan Publik atas indikator ini?

COST Indonesia

1. xx

